



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA  
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN  
BULAN AGUSTUS 2017**

**Pendahuluan**

Komnas HAM dapat dikatakan merupakan lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Koorporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan**

Pada 1 sampai dengan 31 Agustus 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **602 berkas**.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

**1. Kategori Berkas**

No	Kategori Berkas	Jumlah
1	Berkas Kasus Baru 1x	<b>89</b>
2	Berkas Kasus Lanjutan	<b>337</b>

3	Berkas Baru 1x File	<b>95</b>
4	Berkas Lanjutan File	<b>81</b>
	Jumlah	<b>602</b>

## 2. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	<b>9</b>	20	Kalimantan Barat	<b>7</b>
2	Sumatera Utara	<b>49</b>	21	Kalimantan Selatan	<b>2</b>
3	Bengkulu	<b>2</b>	22	Kalimantan Tengah	<b>9</b>
4	Jambi	<b>5</b>	23	Kalimantan Timur	<b>17</b>
5	Riau	<b>14</b>	24	Kalimantan Utara	<b>1</b>
6	Sumatera Barat	<b>25</b>	25	Gorontalo	<b>0</b>
7	Sumatera Selatan	<b>16</b>	26	Sulawesi Selatan	<b>25</b>
8	Lampung	<b>12</b>	27	Sulawesi Tenggara	<b>6</b>
9	Kepulauan Bangka Belitung	<b>0</b>	28	Sulawesi Tengah	<b>10</b>
10	Kepulauan Riau	<b>9</b>	29	Sulawesi Utara	<b>6</b>
11	Banten	<b>9</b>	30	Sulawesi Barat	<b>0</b>
12	Jawa Barat	<b>48</b>	31	Sulawesi Selatan Barat	<b>P</b>
13	DKI Jakarta	<b>145</b>	32	Maluku	<b>17</b>
14	Jawa Tengah	<b>32</b>	33	Maluku Utara	<b>1</b>
15	Jawa Timur	<b>59</b>	34	Papua	<b>12</b>
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	<b>5</b>	35	Tanpa Alamat	<b>29</b>
17	Bali	<b>5</b>			
18	Nusa Tenggara Barat	<b>9</b>			
19	Nusa Tenggara Timur	<b>4</b>		Jumlah	<b>602</b>

## 3. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	<b>337</b>
2	Subkomisi mediasi	<b>80</b>
3	Tim 65	<b>9</b>
4	Tim KZ	<b>0</b>
5	TIM	<b>0</b>
6	File	<b>176</b>
	Jumlah	<b>602</b>

#### 4. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	<b>334</b>
2	Tembusan	<b>254</b>
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	<b>4</b>
Jumlah		<b>602</b>

#### 5. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	<b>41</b>
2	Pos	<b>497</b>
3	Fax	<b>2</b>
4	Email	<b>47</b>
5	Online	<b>7</b>
6	Audiensi	<b>6</b>
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	<b>2</b>
Jumlah		<b>602</b>

#### 6. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	<b>13</b>
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	<b>0</b>
3	Hak mengembangkan diri	<b>6</b>
4	Hak memperoleh keadilan	<b>218</b>
5	Hak atas kebebasan pribadi	<b>16</b>
6	Hak atas rasa aman	<b>52</b>
7	Hak atas kesejahteraan	<b>232</b>
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	<b>9</b>
9	Hak perempuan	<b>2</b>
10	Hak anak	<b>4</b>
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	<b>1</b>
12	Non HAM	<b>49</b>
Jumlah		<b>602</b>

##### 6.1. Klasifikasi pengaduan

<b>I. Hak Untuk Hidup</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Mempertahankan hidup	6
Lingkungan hidup	7
	13
<b>II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	0
	0
<b>III. Hak mengembangkan diri</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak atas pendidikan	5
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	6
<b>IV. Hak memperoleh keadilan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	172
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	4
Kesewenang-wenangan proses hukum di peradilan	37
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	4
	217
<b>V. Hak atas kebebasan pribadi</b>	
Keutuhan pribadi	1
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	7
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	2
Berkumpul, berapat, dan berserikat	2
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	1
Menyampaikan pendapat di muka umum	3
Status kewarganegaraan	0
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	0
	16
<b>VI. Hak atas rasa aman</b>	
Mencari suaka	0
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	8
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	12
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	7

Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	0
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	16
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	9
	52
<b>VII. Hak atas kesejahteraan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak untuk mempunyai milik	14
Hak atas kepemilikan tanah	106
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	47
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	14
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	36
Hak atas kesehatan	11
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
	231
<b>VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	0
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil	1
Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	8
	9
<b>IX. Hak perempuan</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam anggota badan legislatif, eksekutif & yudikatif	0
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	9
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	0
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	1
Hak atas kesetaraan dengan suami	1
	2
<b>X. Hak anak</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	0
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	2
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	2
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	0
	4
<b>XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif</b>	<b>Jumlah berkas</b>

Pemberlakuan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	1
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	0
	1
<b>XII. Non HAM</b>	<b>Jumlah berkas</b>
Non Ham	51
Jumlah Seluruh	602

## 7. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Korporasi	4
2	Lembaga pelayanan kesehatan	1
3	Lembaga pendidikan	2
4	Individu - Orang seorang	345
5	Individu - Anak	4
6	Individu - Perempuan	9
7	Individu - Pekerja/Profesi	19
8	Individu - Suku	1
9	Individu - Penyandang cacat	1
10	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
11	Individu - Narapidana	2
12	Kelompok - Masyarakat	127
13	Kelompok - Anak anak	1
14	Kelompok - Buruh Migran	1
15	Kelompok - Pekerja	36
16	Kelompok - Masyarakat Adat	18
17	Kelompok - Ras dan Etnis	2
18	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	3
19	Kelompok - LGBT	1
20	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	4
21	Kelompok - Narapidana	1
22	Organisasi	3
23	Warga Negara Asing (WNA)	2
24	Tanpa Keterangan Pihak Korban	14

## 8. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementerian)	51

2	Pemerintah daerah	64
3	Lembaga legislatif	1
4	Lembaga negara (non kementerian)	7
5	Lembaga peradilan	45
6	POLRI	215
7	TNI	27
8	Kejaksaan	6
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	2
10	Pemerintah negara lain	1
11	Korporasi	96
12	BUMN/BUMD	24
13	Lembaga pelayanan kesehatan	4
14	Lembaga pendidikan	12
15	Individu - Orang seorang	9
16	Individu - Pekerja/Profesi	7
17	Kelompok - Masyarakat	6
18	Kelompok - Pekerja	2
19	Kelompok - Masyarakat Adat	1
20	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	1
21	Organisasi	4
22	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	17